

Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045

DISAMPAIKAN PADA :

KUNJUNGAN KERJA DAN RAPAT KERJA PANSUS IV DPRD PROVINSI JAWA BARAT DALAM RANGKA PENYELERASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG RPJPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2045

Cirebon, 13 Agustus 2024

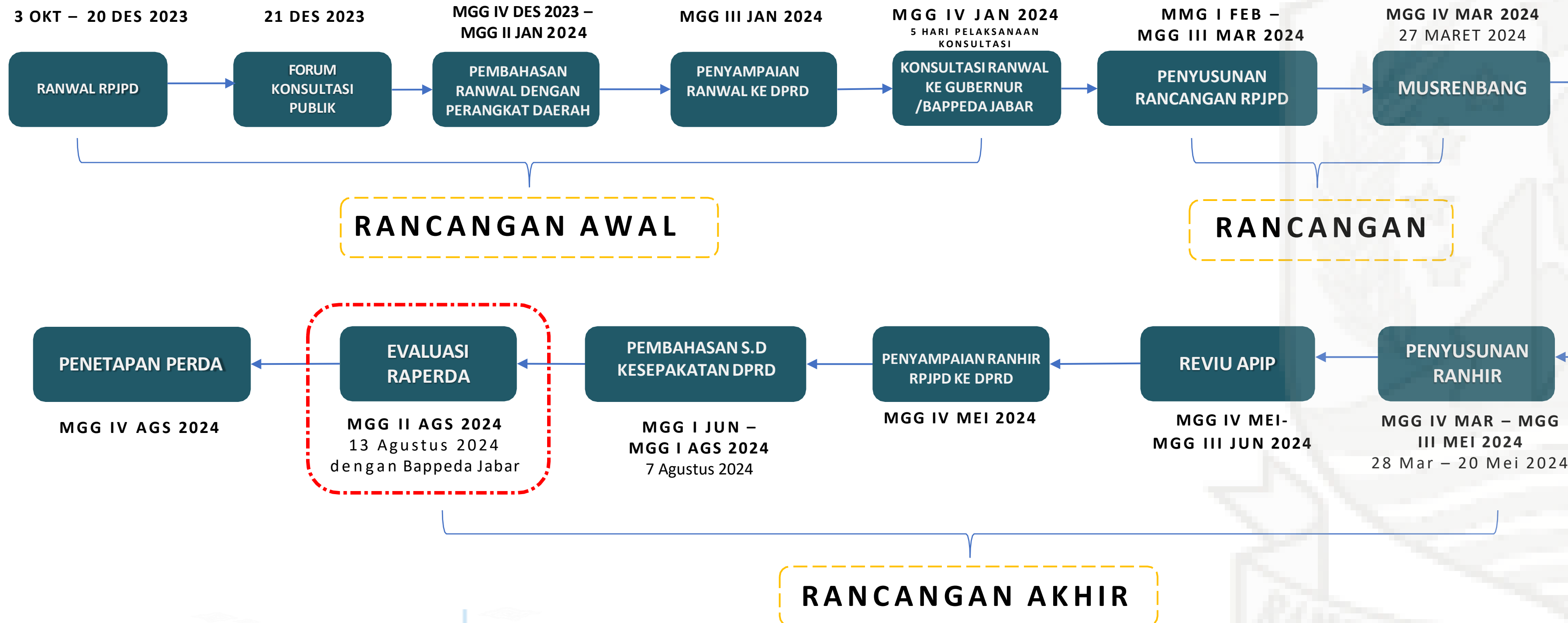


PENDAHULUAN



MILESTONE AGENDA PENYUSUNAN RPJPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2045

PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON



Dasar Hukum Perencanaan

- 01** **UU NOMOR 25 TAHUN 2004**
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 02** **PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
- 03** **INMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2024**
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
- 04** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 14 TAHUN 2009**
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025
- 05** **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2018**
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038
- 06** **SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 600.1/176/SJ & NOMOR 1 TAHUN 2024**
Tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045

PENDEKATAN PENYUSUNAN RPJPD 2025-2045

1 PENDEKATAN TEKNOKRATIK

Menggunakan Metode dan Kerangka Berpikir Ilmiah.

- FGD dengan Akademisi dan inohong
- Analisis Ekonomi Makro
- Evaluasi RPJPD 2005-2025

2 PENDEKATAN PARTISIPATIF

Melibatkan Berbagai Pemangku Kepentingan.

- FGD dengan Komunitas, Kecamatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat
- Penjaringan aspirasi melalui media sosial

3 PENDEKATAN POLITIS

Pembahasan Dengan DPRD

PENDEKATAN ATAS-BAWAH DAN BAWAH ATAS

Memperhatikan arah kebijakan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.

4

- ToT dan Penyelarasan dengan RPJPN
- Konsultasi dan Fasilitasi RPJPD Provinsi Jawa Barat

5 PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK

Upaya Penanganan Secara Menyeluruh dan Terfokus pada Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045

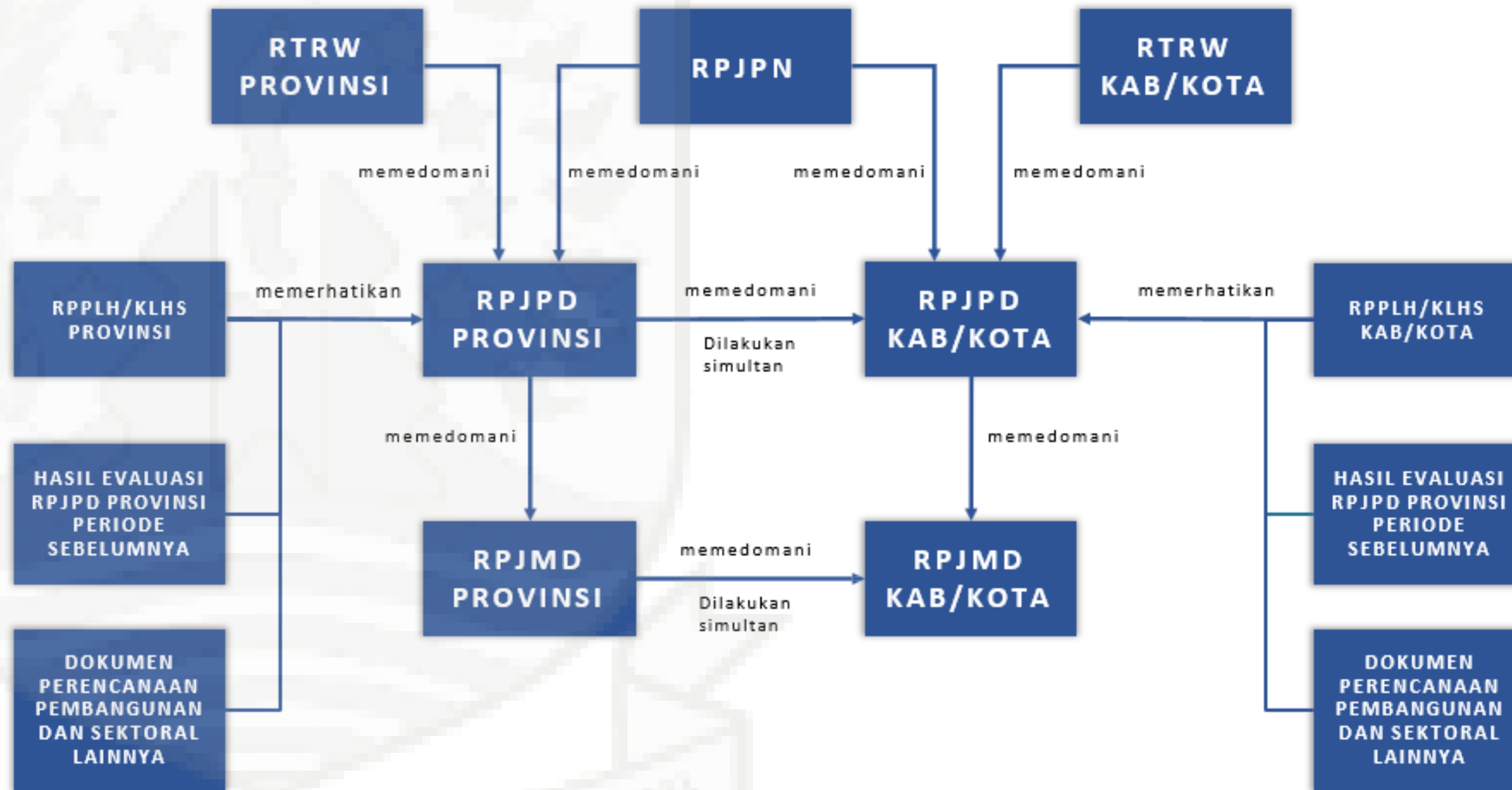
6 PENDEKATAN INTEGRATIF

Keterpaduan dokumen perencanaan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai Sasaran Prioritas Nasional

7 PENDEKATAN SPASIAL

Berdasarkan Aspek Kewilayahan dengan memperhatikan Struktur Keruangan, Pemanfaatan Lahan, dan Keterkaitan Antarwilayah.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Sumber : Inmendagri 1/2024

ACUAN PENYUSUNAN RPJPD 2025 -2045



PENYELARASAN RPJPD DENGAN RPJPN 2025-2045

● PENYELARASAN RPJPD DENGAN RPJPN 2025-2045

Visi daerah dianggap selaras apabila setidaknya mengandung kata “maju” dan “berkelanjutan”

● PENYELARASAN 5 (LIMA) SASARAN VISI RPJP DAERAH KABUPATEN TAHUN 2025-2045 DAN RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045

Menurunkan sasaran visi 1, 2, 4, dan 5 ke Kabupaten dengan target yang ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, sedangkan sasaran dan target Visi 3 disesuaikan/diganti dengan indikator yang mencerminkan Sasaran 3 Kabupaten.

● PENYELARASAN 8 MISI PEMBANGUNAN RPJPN KE DALAM 8 MISI PEMBANGUNAN RPJPD

Misi pembangunan berjumlah 8 (delapan) dan menyesuaikan dengan Visi serta karakteristik daerah dengan tetap menjaga keselarasan substansi Misi provinsi;

● PENYELARASAN 17 ARAH PEMBANGUNAN RPJPN KE DALAM RPJPD

Arah Pembangunan Daerah berjumlah 17 (tujuh belas) dan tetap menyelaraskan dengan arah kebijakan provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota serta pemenuhan Standar Pelayanan;

● PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN DAN SARANA PRASARANA RPJPD DAN RPJPN 2025-2045

Menerjemahkan Bab V RPJPN Tahun 2025-2045 ke dalam Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten dengan merujuk pada Lampiran SEB Buku II Bagian III, Perda tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (MCR), dan Perda RTRW 2022-2042 Jawa Barat No.9 Tahun 2022 .

● PENYELARASAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (45 INDIKATOR) RPJPD DAN RPJPN 2025-2045

Memastikan indikator yang digunakan dalam RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 mengacu pada Lampiran SEB Buku I Bagian II (Tabel 2.2), mencakup indikator nasional yang diturunkan ke tingkat Kabupaten dan Indikator Proksi.

Konsep Sistematisa RPJPD Tahun 2025-2045



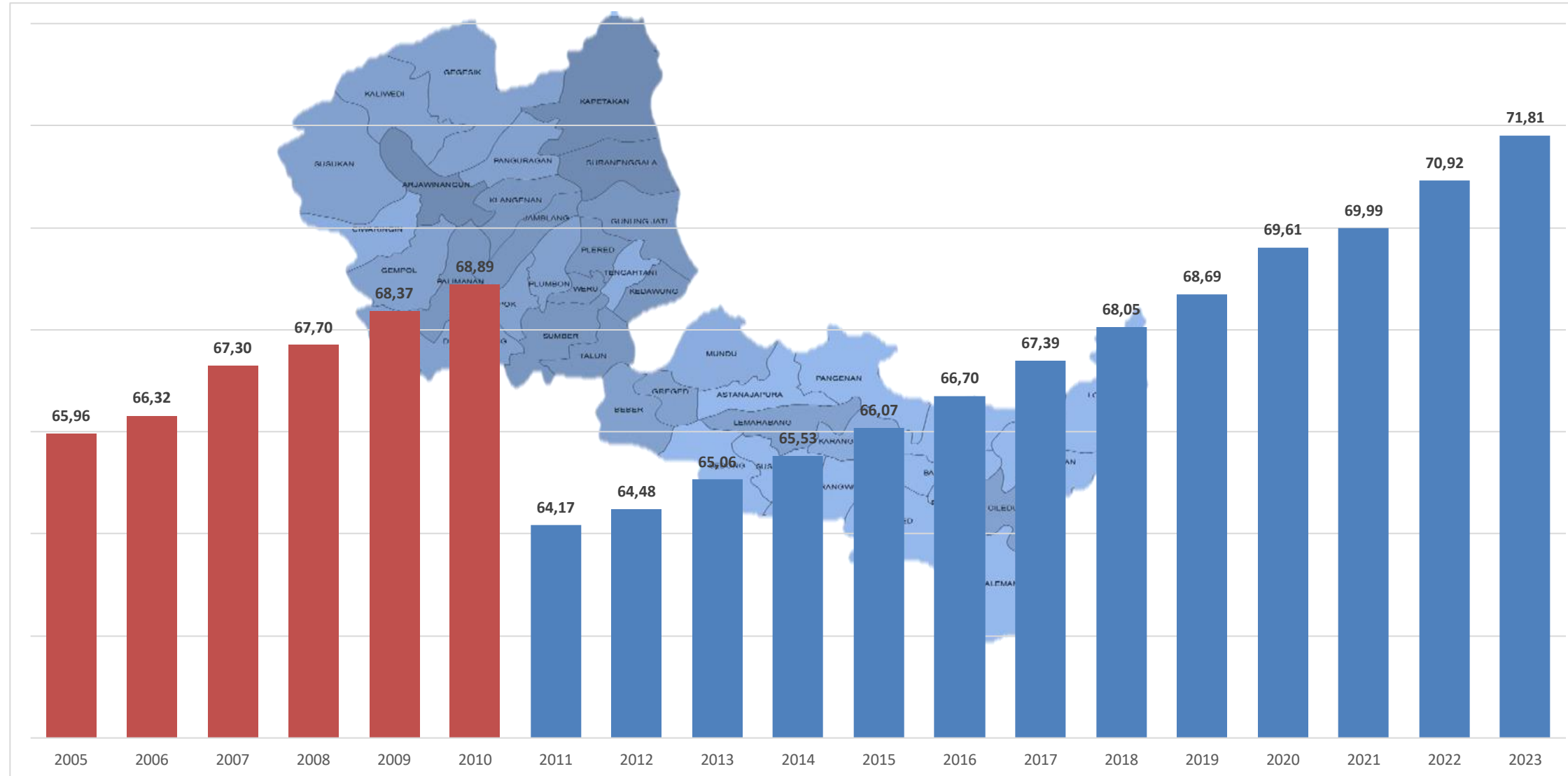


BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

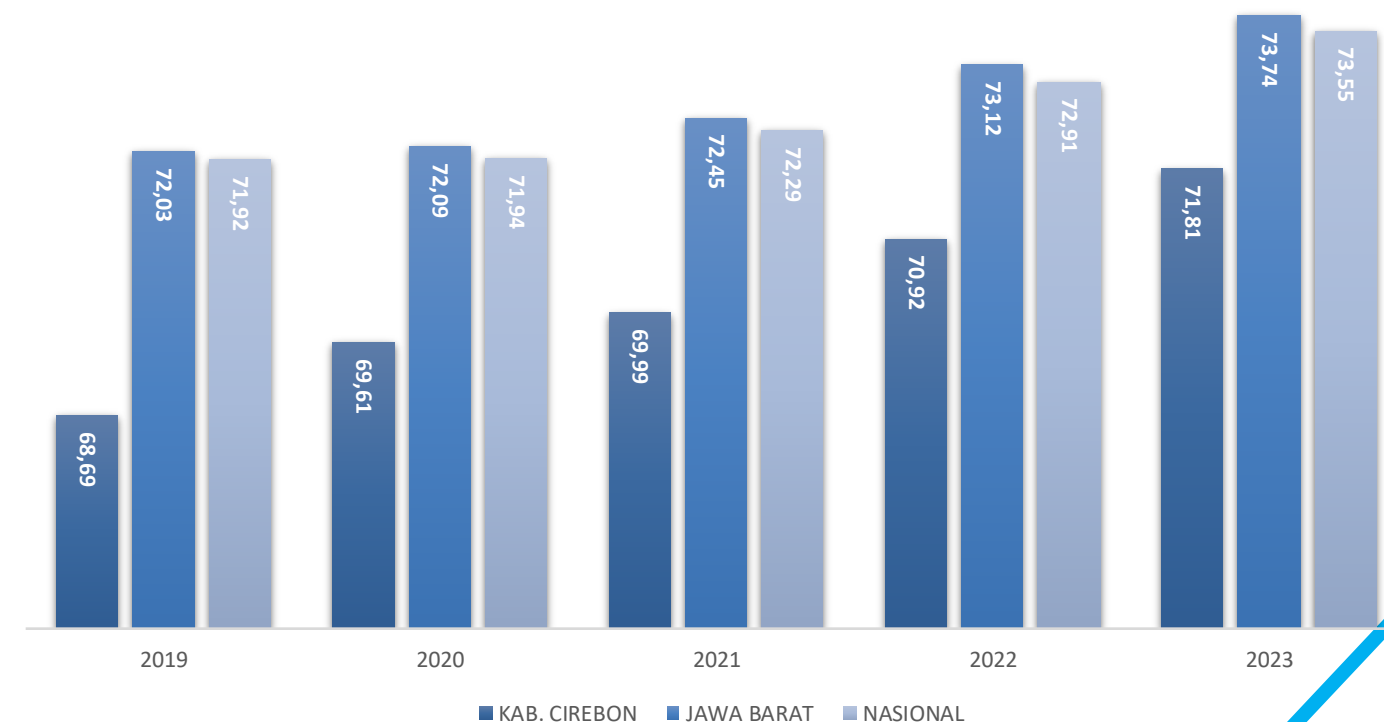


Tahun 2005-2010 menggunakan perhitungan IPM Metode lama

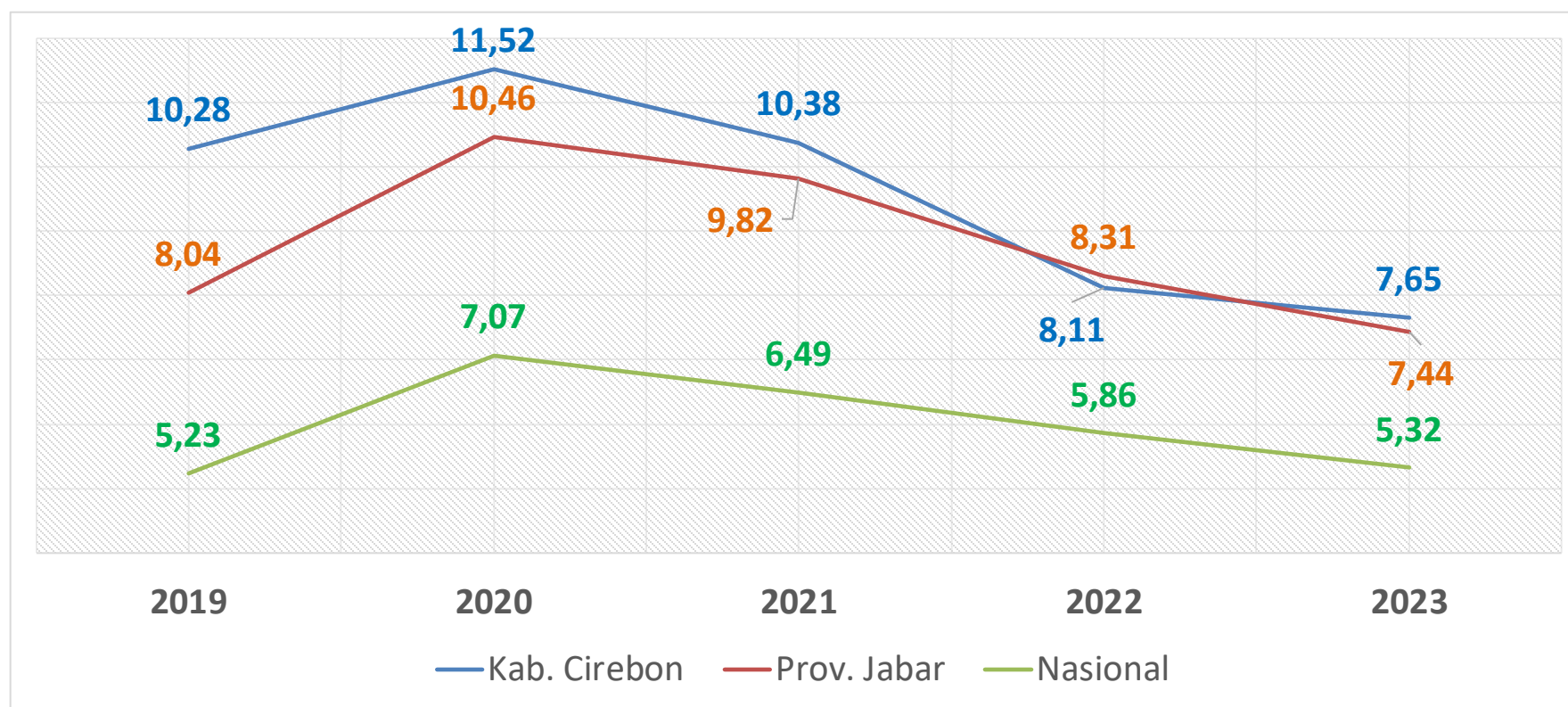
Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Cirebon 2005- 2023

IPM Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan capaian dari kategori “**Sedang**” menjadi “**Tinggi**” pada tahun 2023 (peringkat 9 dari level Kabupaten se-Jawa Barat)



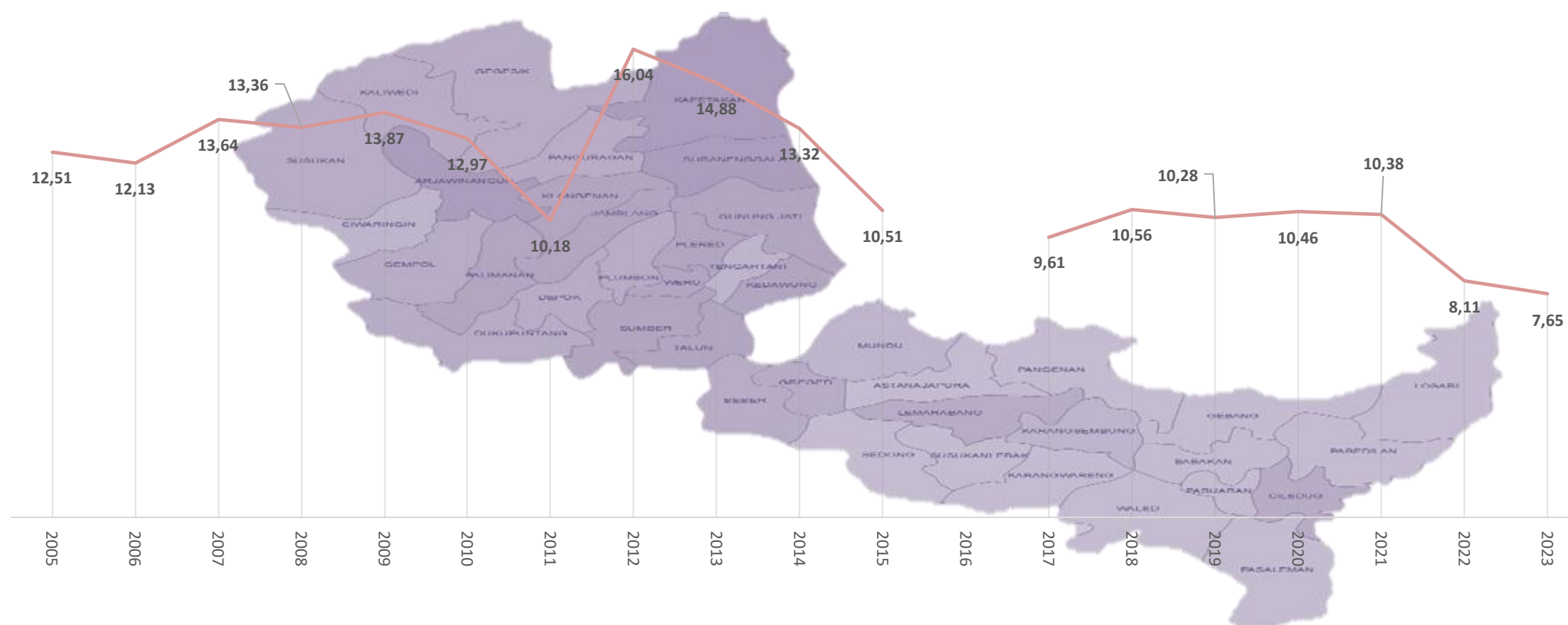
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah **persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.**

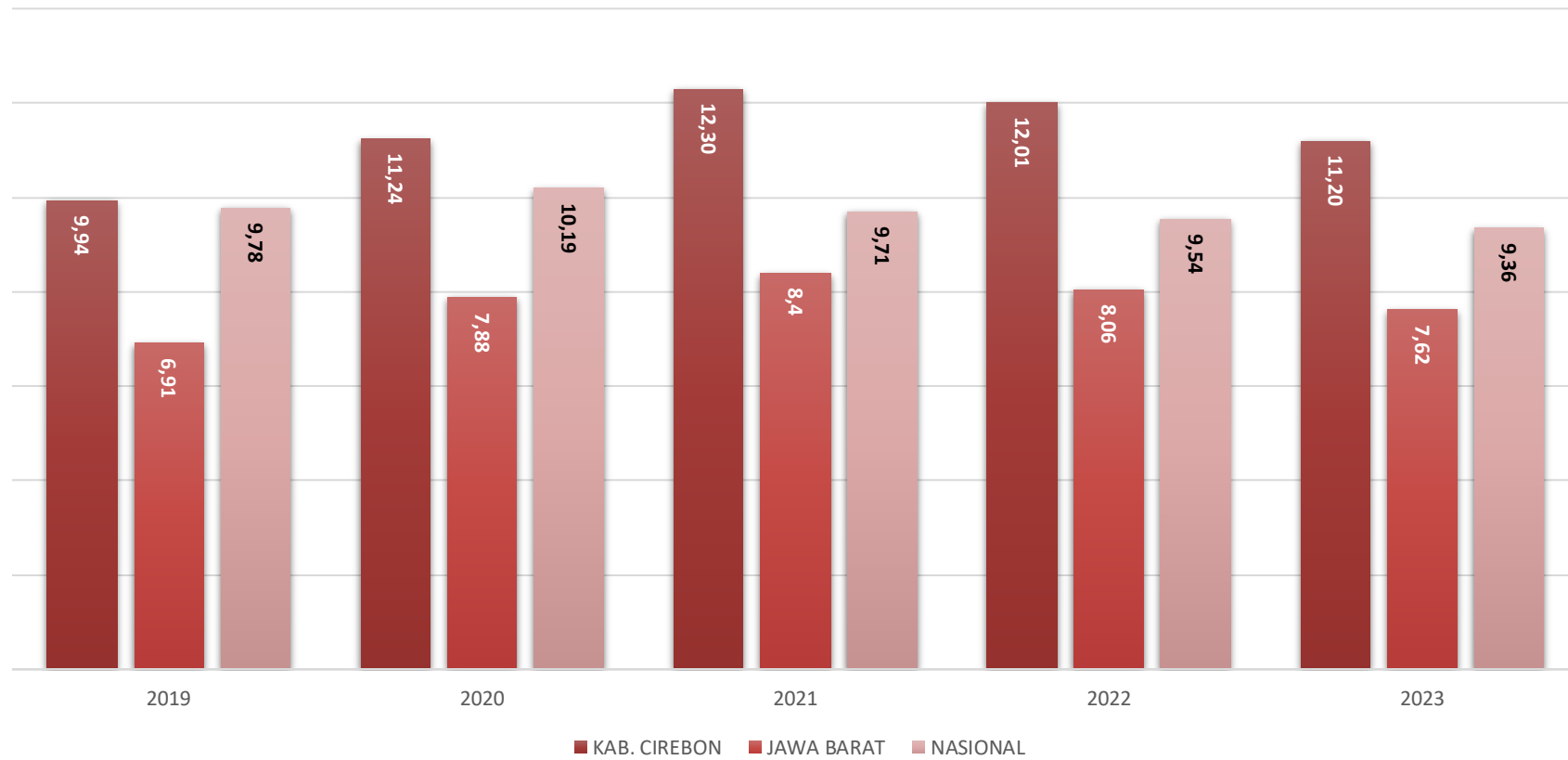
Tingkat Pengangguran
Terbuka Kab. Cirebon 2023

7,65%

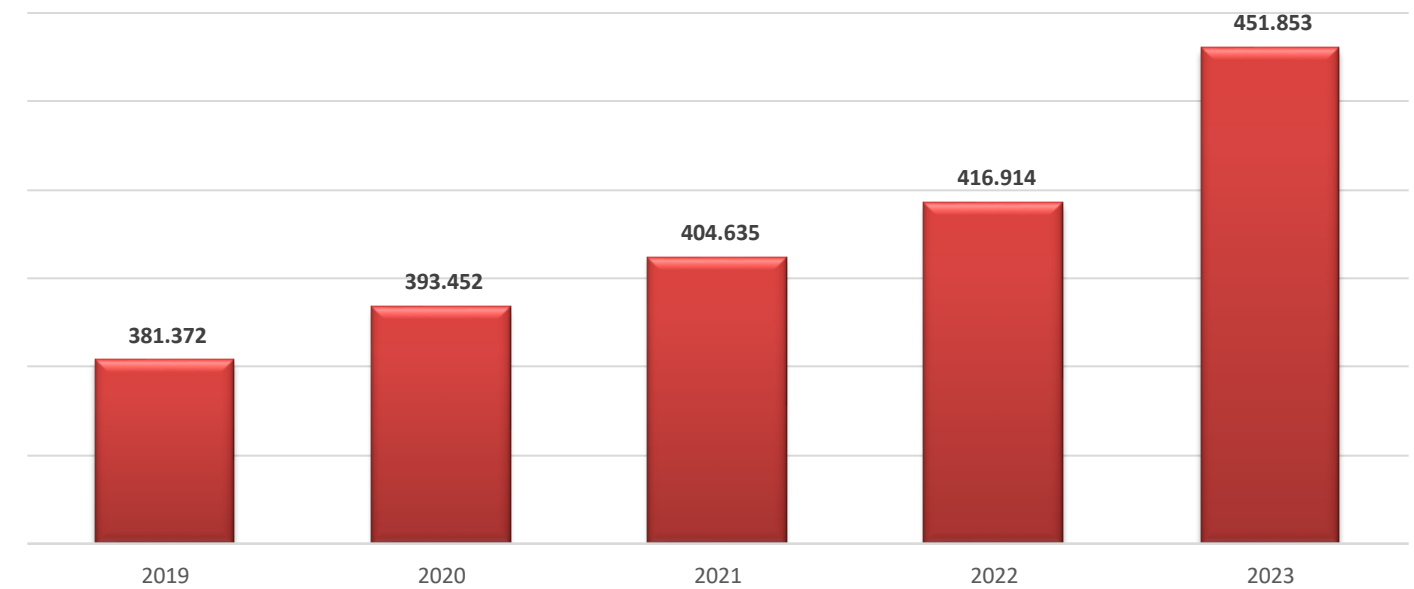


Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, 2024

TINGKAT KEMISKINAN

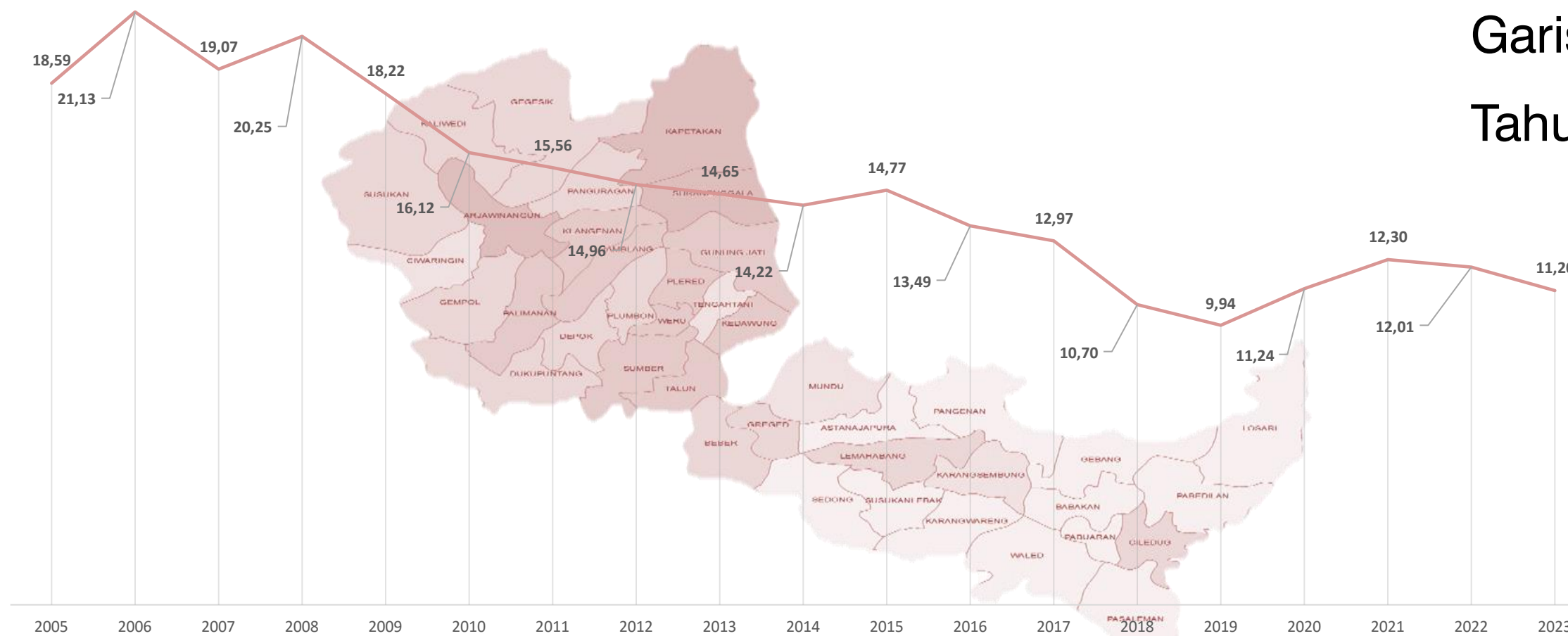


Kabupaten Cirebon berada pada posisi ke 4 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2023.



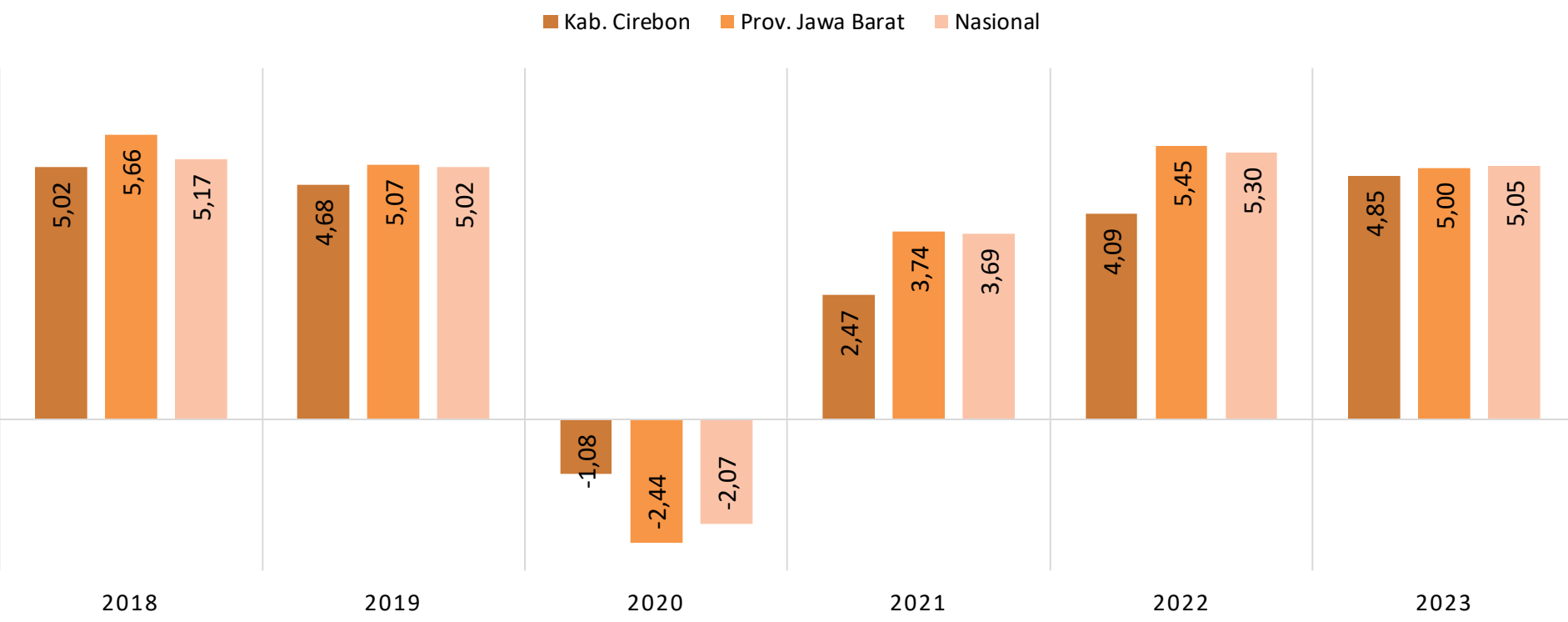
Garis Kemiskinan Kabupaten Cirebon

Tahun 2023 adalah **Rp 451.853,00/orang/bulan**

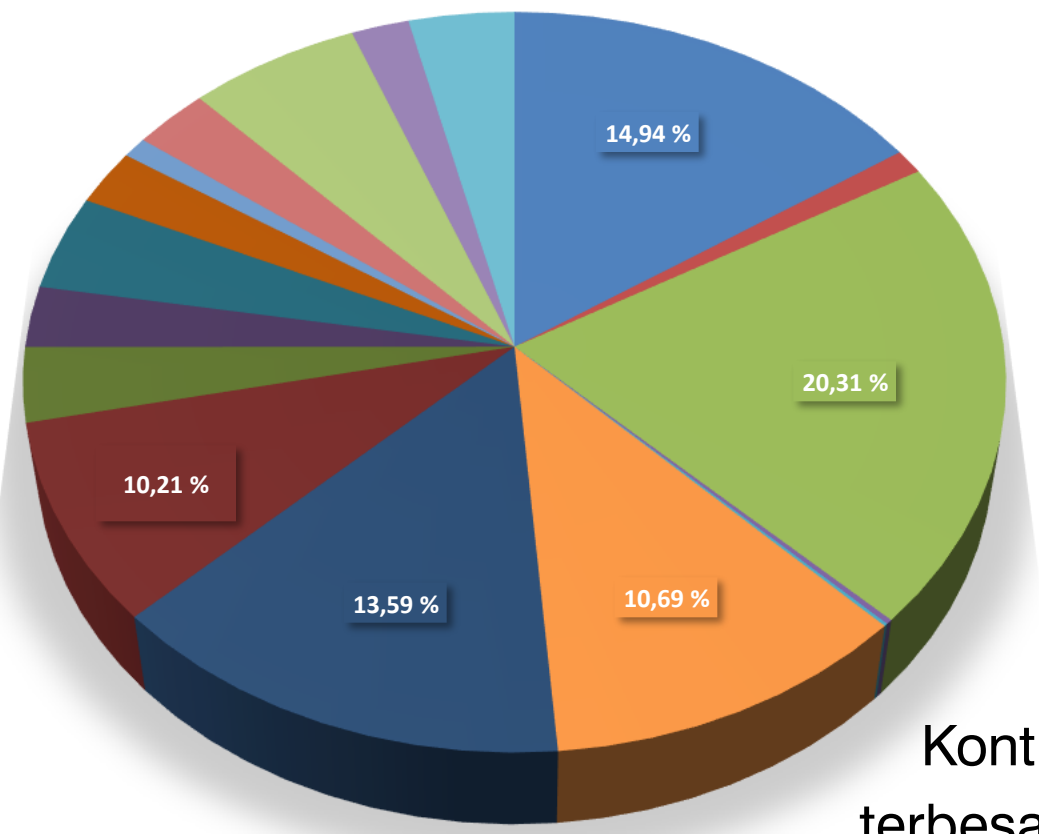


Sumber : BPS kabupaten Cirebon, 2023

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI



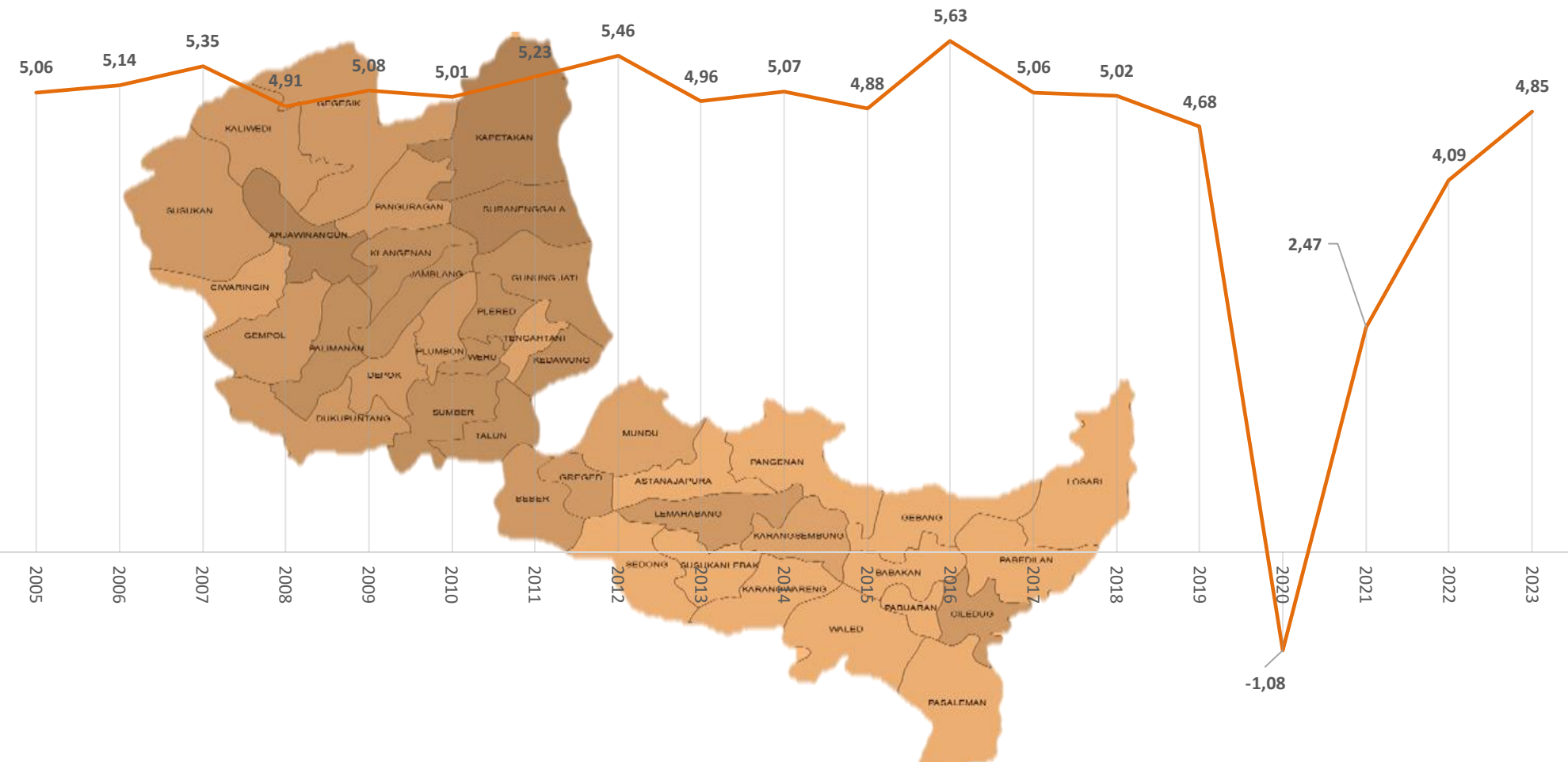
Grafik Distribusi Perekonomian
Kabupaten Cirebon Tahun 2023



Kontribusi perekonomian terbesar Kab. Cirebon 2023 adalah **Industri Pengolahan** sebesar

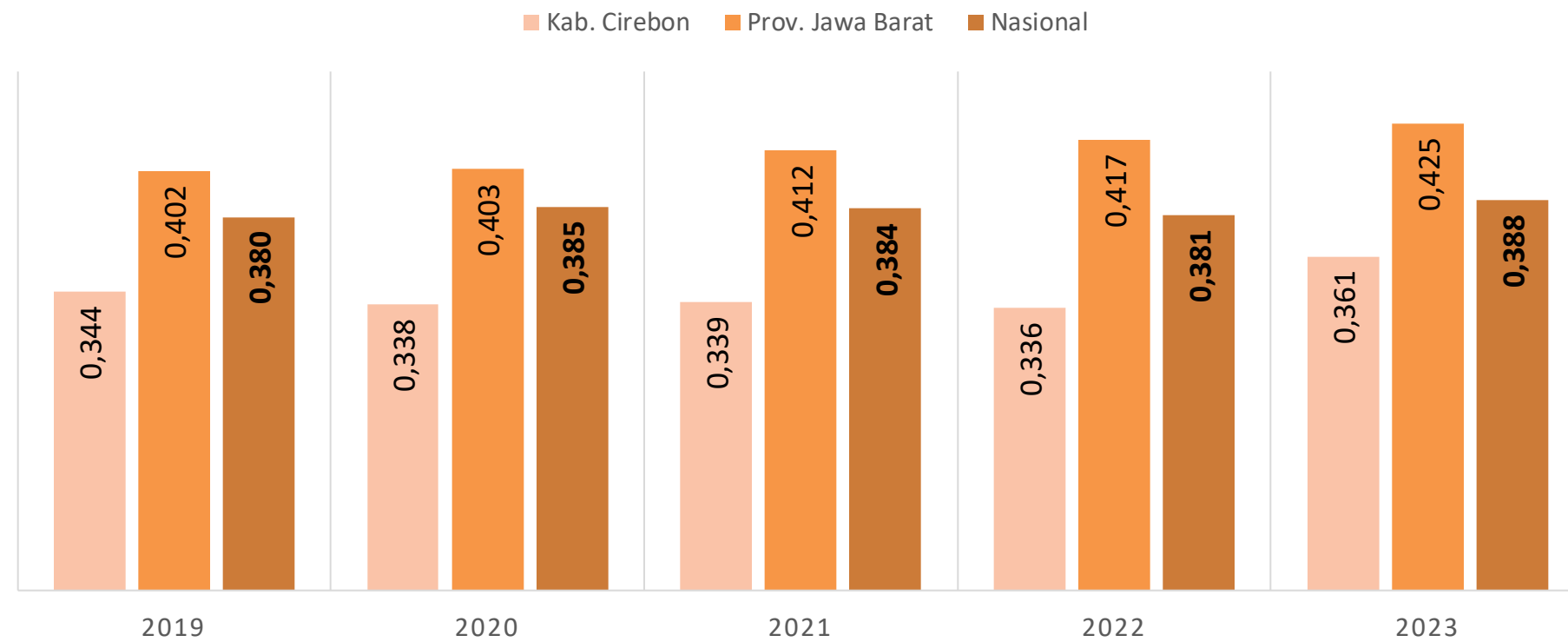
20,31%*

- Industri Pengolahan
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Konstruksi
- Transportasi dan Pergudangan

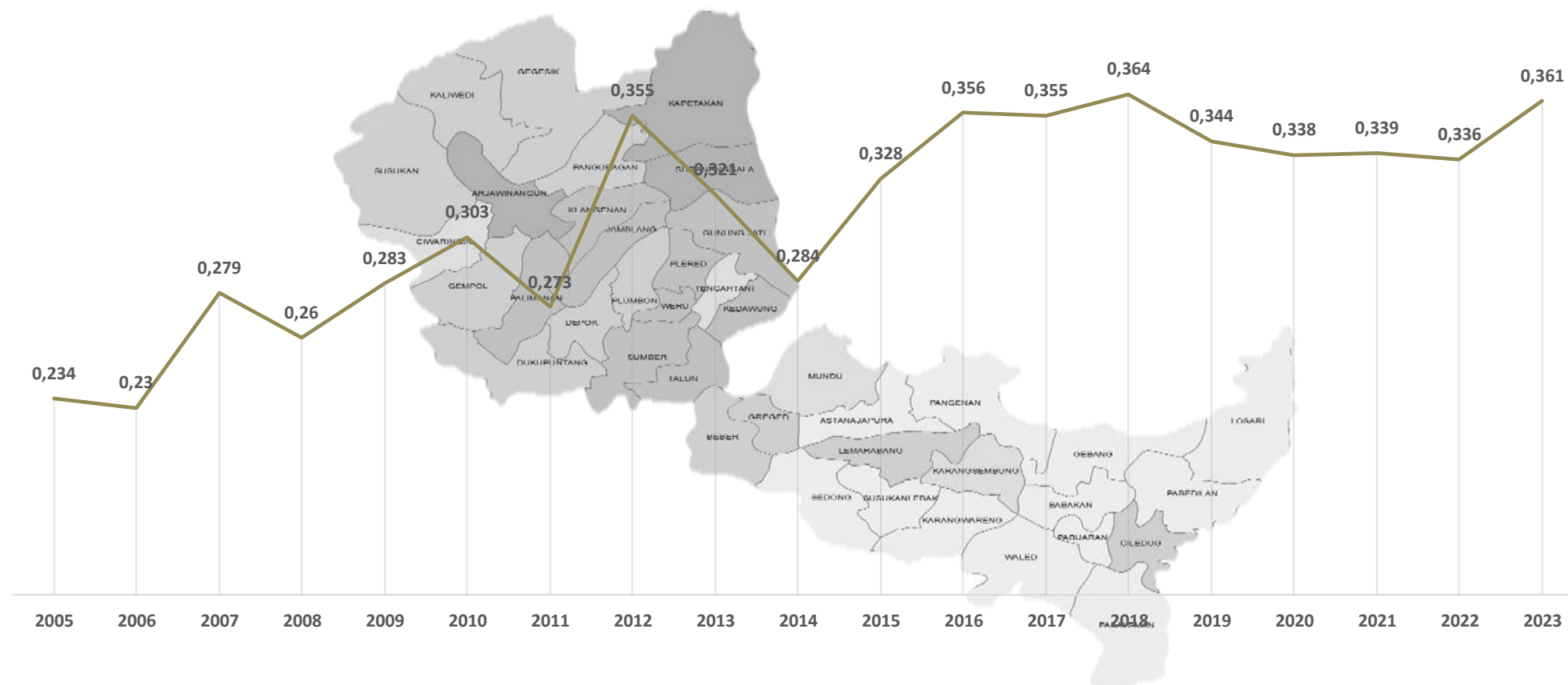


Sumber *: BPS Kabupaten Cirebon, 2024

GINI RATIO



“Indeks Gini Kab. Cirebon tergolong pada klasifikasi **Moderat**”



Klasifikasi Indeks Gini:

< 0,3 → Ketimpangan Rendah

0,3 – 0,5 → Ketimpangan Moderat

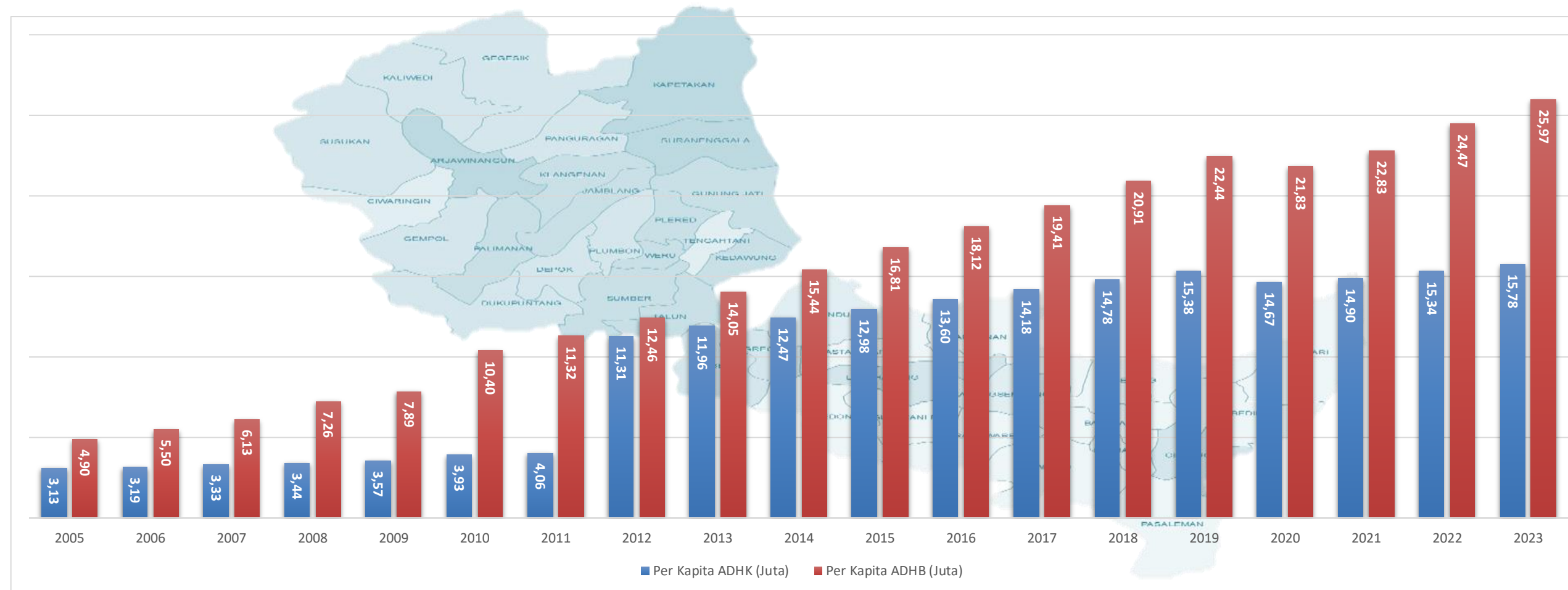
> 0,5 → Ketimpangan Tinggi

PENDAPATAN PERKAPITA

(dalam juta rupiah)

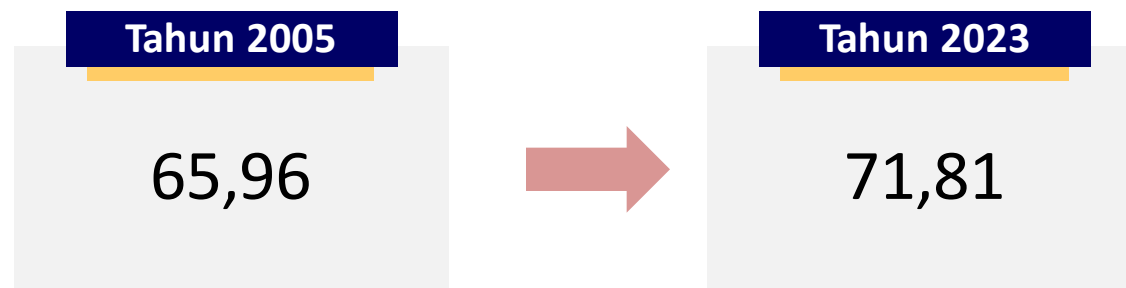


Kabupaten Cirebon termasuk dalam Wilayah Relatif Tertinggal, merupakan wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Kabupaten / Kota di Provinsi.



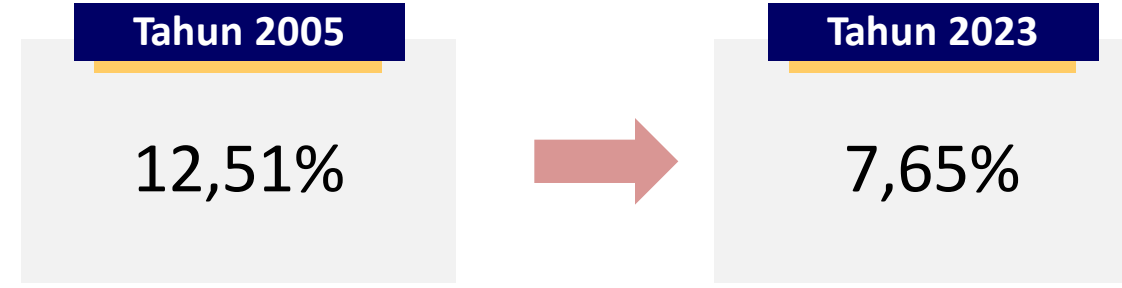
Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Cirebon

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



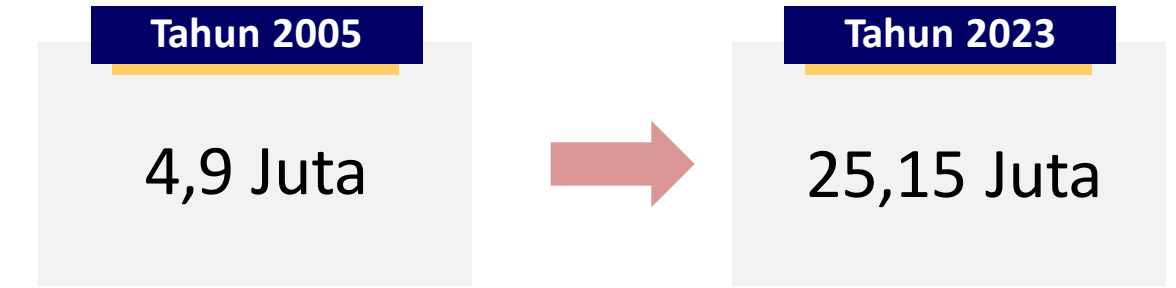
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2005 - 2022 mengalami peningkatan capaian dari kategori "Sedang" menjadi "**Tinggi**" pada tahun 2023.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



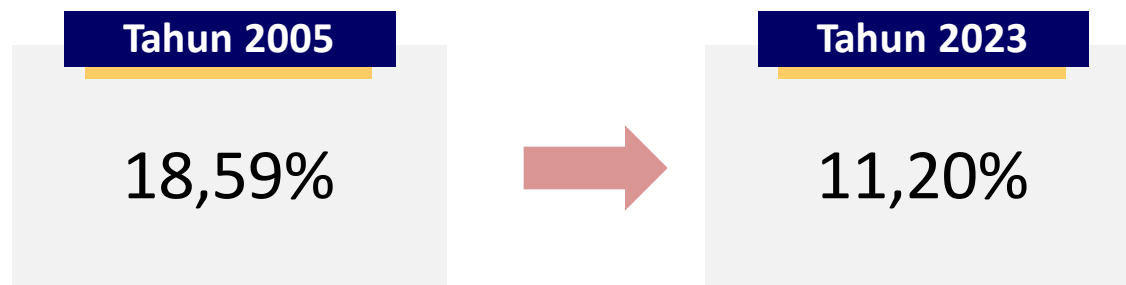
salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memperluas Kawasan Peruntukkan Industri yang tertuang di RTRW sebesar 10.000 ha yang memberikan dampak langsung terhadap kenaikan kebutuhan pekerja baru.

PENDAPATAN PER KAPITA



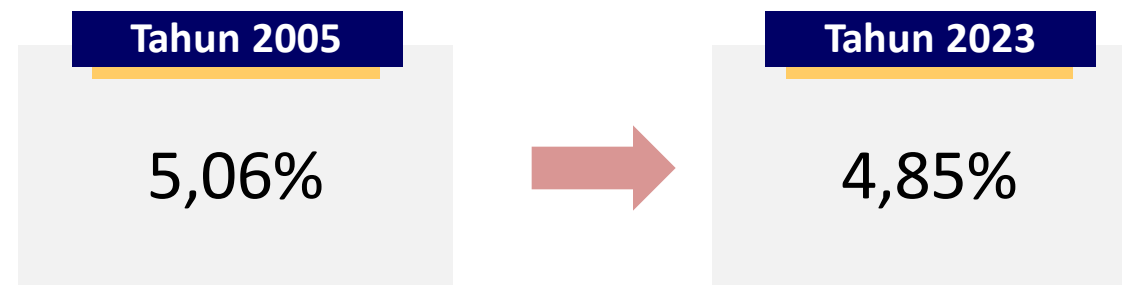
Pendapatan per kapita Kabupaten Cirebon dari tahun 2005–2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

ANGKA KEMISKINAN



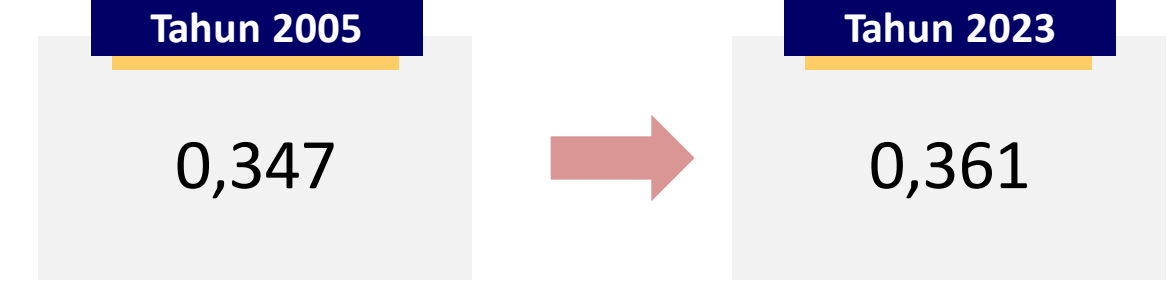
tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi yang disebabkan oleh masih kurangnya faktor-faktor produksi sehingga mengakibatkan masih tingginya jumlah penduduk yang tidak bekerja dan bertambahnya jumlah masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI



pada tahun 2020 Kabupaten Cirebon mengalami kontraksi yang mencapai -1,08 persen yang disebabkan oleh kejadian pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi kembali positif pada tahun 2021 yakni sebesar 2,47 persen dan tahun 2022 kembali mengalami pertumbuhan sebesar 4,09 persen. Pada tahun 2023 naik sebesar 4,85 persen

KETIMPANGAN PENDAPATAN



Selama periode tahun 2005-2009, Indeks Gini Kabupaten Cirebon masuk ke dalam kategori "rendah" dengan kisaran 0,2 kemudian tahun 2010 – 2022 masuk ke dalam kategori "moderat" dengan kisaran 0,3 sampai dengan di tahun 2023, diperoleh sebesar 0,361.

Capaian Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Cirebon

Tahap Pertama

Tahun 2005-2009

Dari 52 indikator tersebut, 39 indikator capaian kinerjanya sangat tinggi, 10 indikator capaian kinerjanya tinggi, 2 indikator capaian kinerjanya rendah dan 1 indikator capaian kinerjanya sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan kinerja sasaran daerah pada RPJMD Tahap pertama adalah **“Sangat Baik”**.

Tahap Kedua

Tahun 2009-2014

Dari 13 indikator tersebut, 6 indikator capaian kinerjanya sangat tinggi, 4 indikator capaian kinerjanya tinggi, 2 indikator capaian kinerjanya sedang dan 1 indikator capaian kinerjanya rendah. Sehingga dapat disimpulkan kinerja sasaran daerah pada RPJMD Tahap Kedua adalah **“Sangat Baik”**.

Tahap Ketiga

Tahun 2014-2019

Dari 77 indikator tersebut, 51 indikator capaiannya sangat tinggi, 10 indikator capaiannya tinggi, 3 indikator capaiannya sedang, 2 indikator capaiannya rendah, dan 11 indikator capaiannya sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan kinerja sasaran daerah pada RPJMD Tahap Ketiga adalah **“Sangat Baik”**.

Tahap Keempat

Tahun 2019-2024

Dari 34 indikator tersebut, 27 indikator capaian kinerjanya sangat tinggi, 6 indikator capaian kinerjanya tinggi, 1 indikator capaian kinerjanya rendah dan 1 indikator capaian kinerjanya sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan kinerja sasaran daerah pada RPJMD Tahap Keempat adalah **“Sangat Baik”**.

PROYEKSI PENDUDUK KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2045

PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON



2025

KABUPATEN CIREBON : 2,413,810

JAWA BARAT: 50,761,005

2030

KABUPATEN CIREBON : 2,527,540

JAWA BARAT: 52,699,013

2035

KABUPATEN CIREBON : 2,616,210

JAWA BARAT: 54,444,913

2040

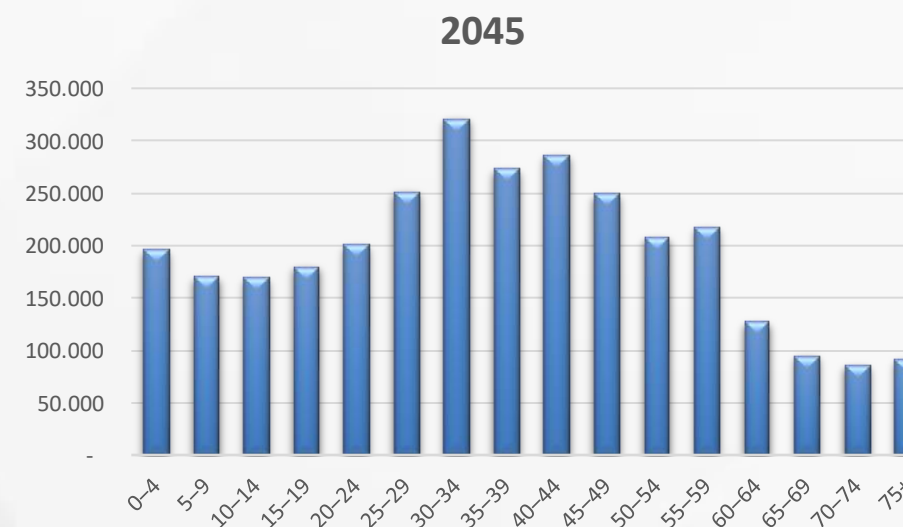
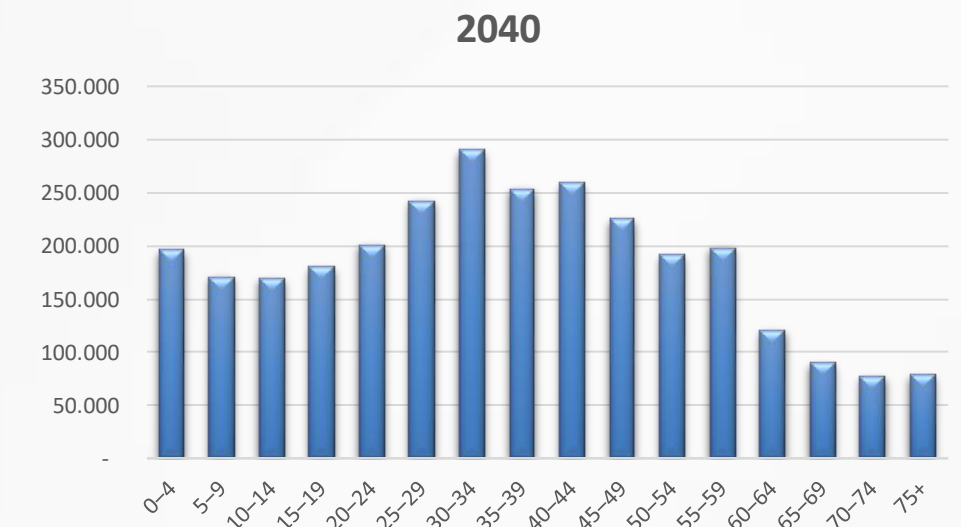
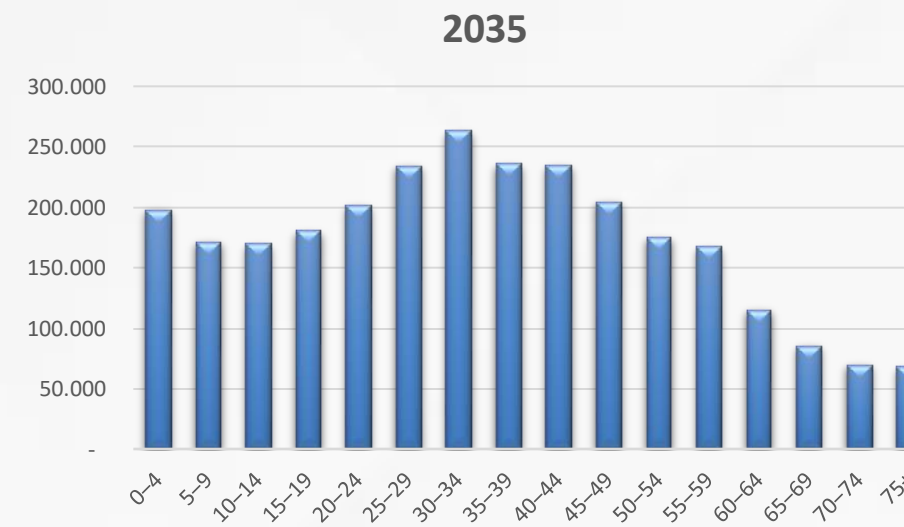
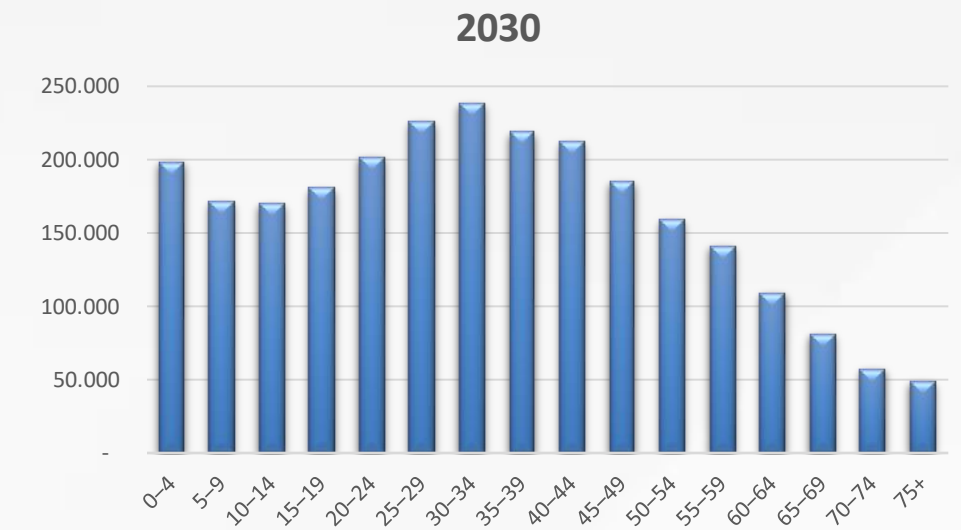
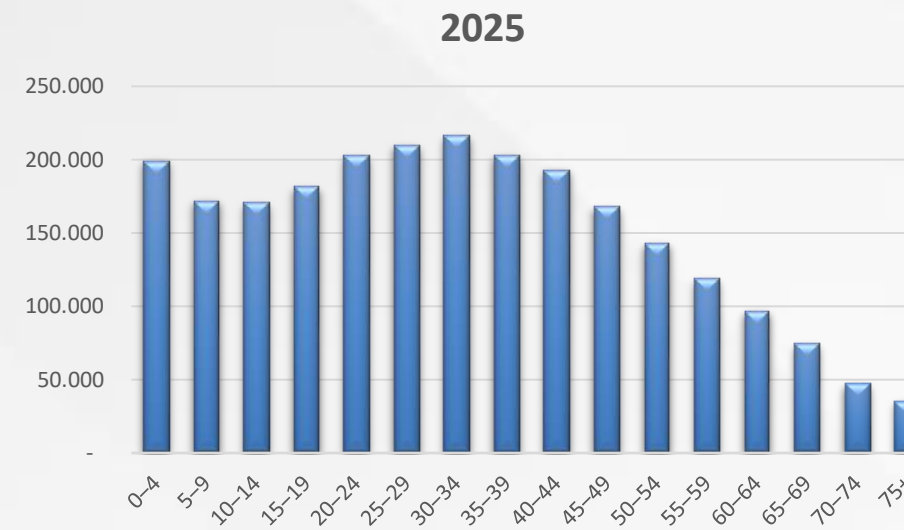
KABUPATEN CIREBON : 2,680,924

JAWA BARAT: 55,831,317

2045

KABUPATEN CIREBON : 2,727,616

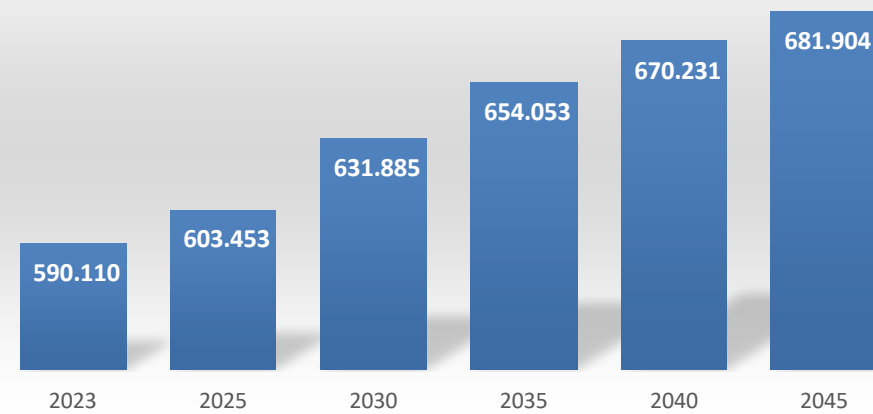
JAWA BARAT: 56,805,776



**BONUS DEMOGRAFI DILIHAT
DARI KATEGORI JUMLAH
PENDUDUK DI USIA PRODUKTIF**

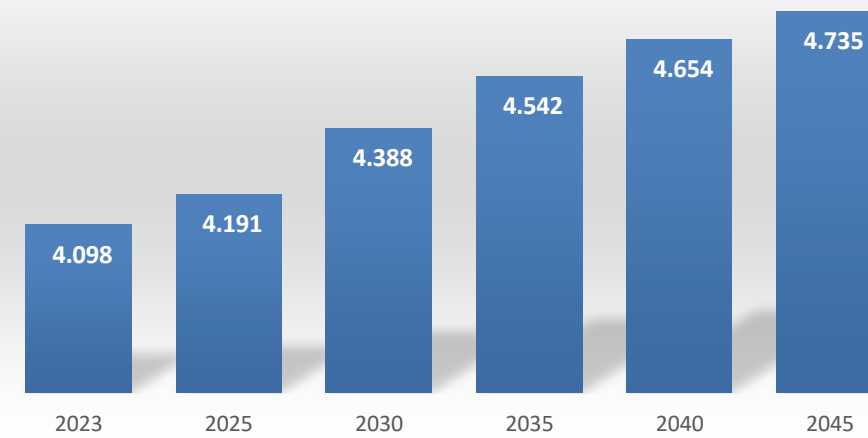
Proyeksi Kebutuhan Sarana & Prasarana

Proyeksi kebutuhan rumah (Unit)



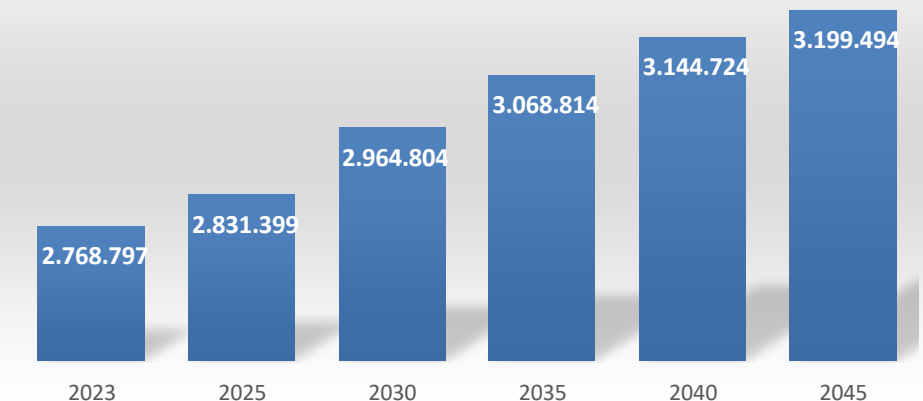
Pada Tahun 2045 diperkirakan kebutuhan rumah mencapai lebih dari 681 ribu unit rumah.

Proyeksi kebutuhan air minum (lt/dtk)

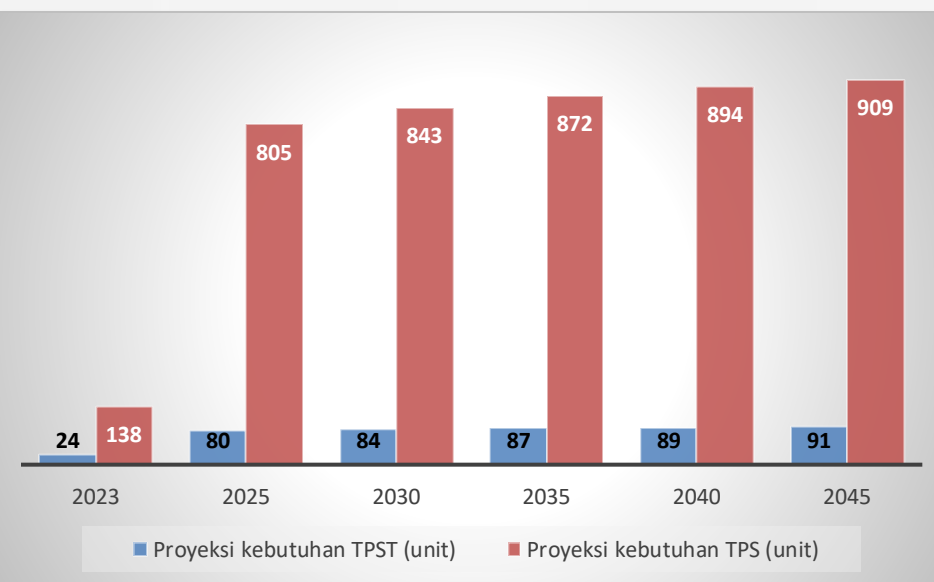


Pada Tahun 2045 diperkirakan kebutuhan air bersih mencapai 4.735 ltr/dtk

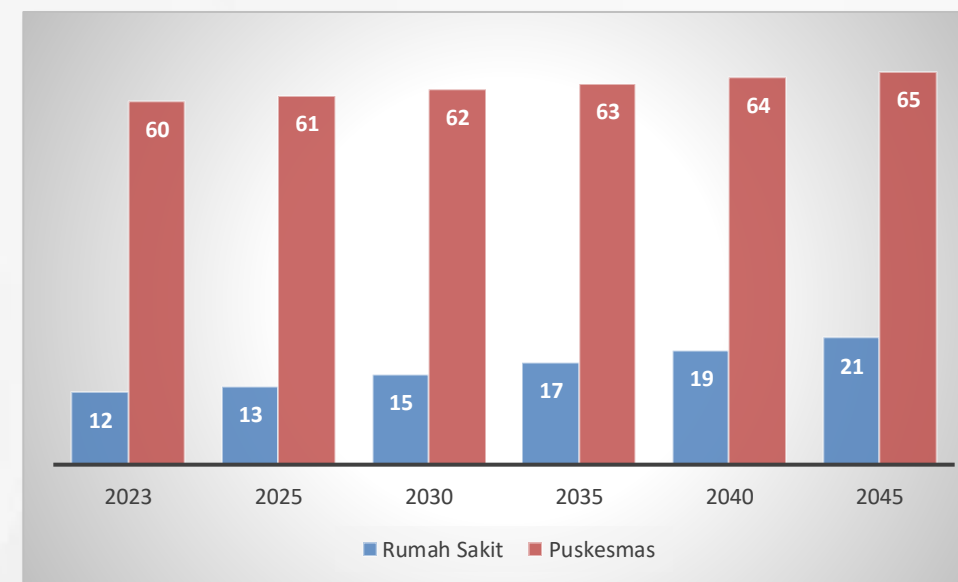
Proyeksi Kebutuhan Listrik (Mwh)



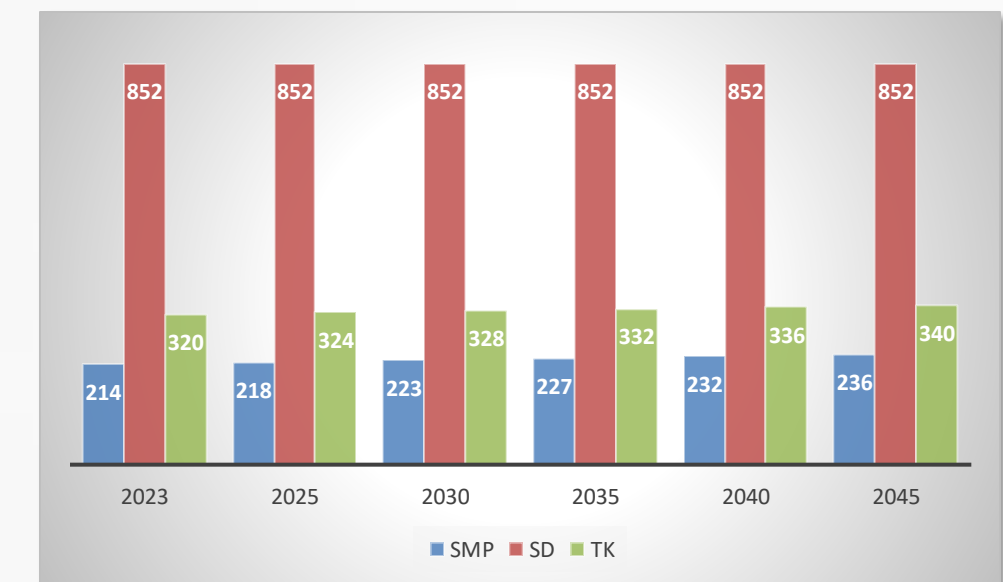
Diproyeksikan kebutuhan Listrik Kabupaten Cirebon sebesar 3,2 juta Mwh di Tahun 2045



Pada Tahun 2045 diperkirakan kebutuhan TPST sebanyak 91 unit dan kebutuhan TPS sebanyak 909 unit



Jumlah tempat tidur fasilitas pelayanan Kesehatan harus mencukupi jumlah penduduk. Rasio tempat tidur yaitu 1 TT : 1077 penduduk



Untuk meningkatkan rapor Pendidikan (RLS, HLS) dibutuhkan Gedung sekolah yang cukup

Satuan Wilayah Pengembangan

	SWP 1	SWP 2	SWP 3	SWP 4	SWP 5
PKL	CILEDUG	LEMAHABANG	SUMBER	PALIMANAN	ARJAWINANGUN
PPK	BABAKAN	ASTANAJAPURA	PLUMBIN		KEPETAKAN
	LOSARI	KARANGSEMBUNG	KEDAWUNG		PANGURAGAN
			TALUN		GEGESIK
PPL	GEBANG	PANGANAN	GUNUNG JATI	SURANENGGALA	KALIWEDI
	PEBEDILAN	KARANGWARENG	PLERED	JAMBLANG	SUSUKAN
	PABUARAN	SUSUSKAN LEBAK	TENGAH TANI	KLANGENAN	CIWARINGIN
	WALED	SEDONG	WERU	GEMPOL	
	PASALEMAN	BEBER	DUKUPUNTANG	DEPOK	
		GREGED			
		MUNDU			



PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN):



Sumber



PKL Sumber dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional sesuai Revisi RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038. PKN Sumber diarahkan untuk mendukung kegiatan skala Internasional, Nasional atau beberapa Provinsi

Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL):



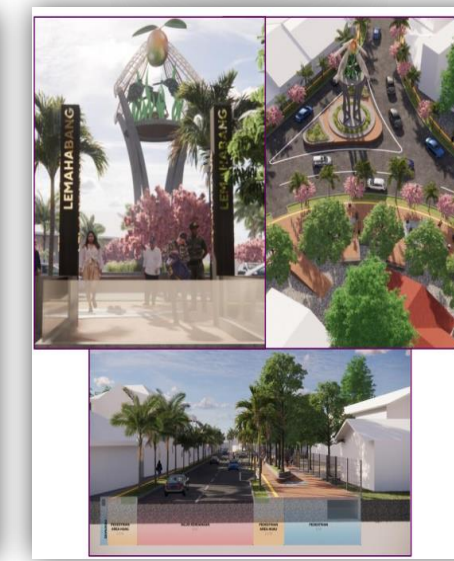
arjawinangun



Palimanan



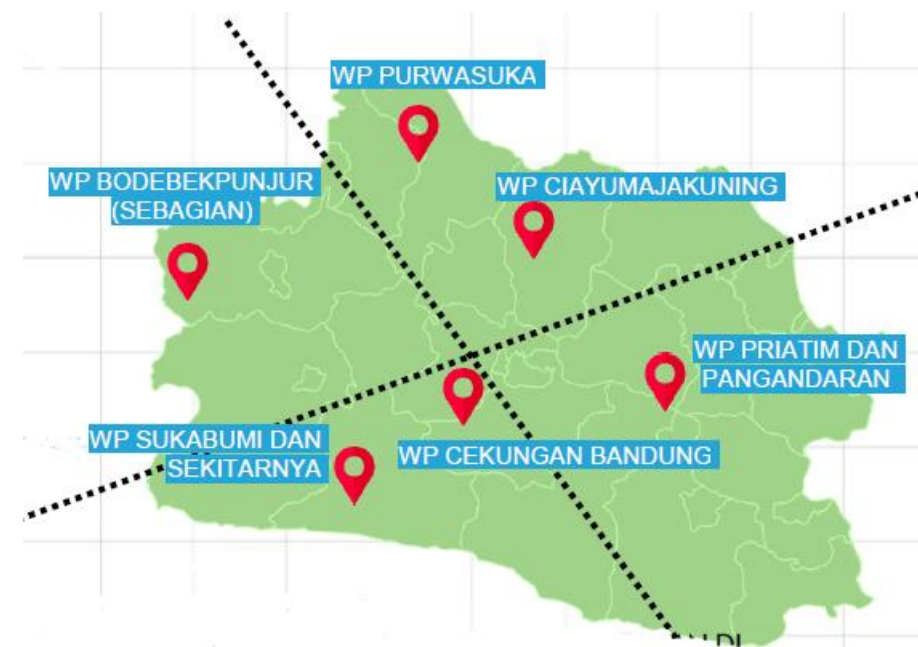
Lemahabang



Ciledug



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN DALAM PERSPEKTIF REGIONAL



WP	KEBIJAKAN WP	ARAH PENGEMBANGAN
CIAYUMAJAKUNING	Kabupaten Cirebon, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, dan mengarahkan kegiatan utama pada sektor bisnis kelautan, tanaman pangan dan hortikultura, pariwisata dan kegiatan pertambangan mineral; industry kreatif, pengembangan kota kreatif berbasis folklore (batik Trusmi);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan infrastruktur strategis 2. Pola ruang PKN dalam bentuk ring (Ring 1: Jasa perdagangan dan transportasi, Ring 2: Industri berbasis lokal, Ring 3: Penyedia bahan baku) 3. Mengembangkan wisata budaya, religi dan alam 4. Mendorong agribisnis yang didukung sektor industri, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan dan peternakan di Kawasan pinggiran 5. Mendorong pengembangan hutan mangrove, rumput laut dan perikanan tambak 6. Pengendalian perikanan tangkap di kawasan pesisir 7. Pengembangan kerja sama wilayah 8. Peningkatan kesiapsiagaan bencana

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN DALAM PERSPEKTIF NASIONAL

Kawasan REBANA



1

Mencakup 7 (tujuh) kabupaten dan kota.

- Pengembangan berbasis *Ecoindustry* (pembangunan eco-industrial park).
- 13 (tiga belas) titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) :
 - ✓ Subang (3)
 - ✓ Indramayu (6)
 - ✓ Majalengka (2)
 - ✓ Sumedang (1)
 - ✓ Kabupaten Cirebon (1)



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



Permasalahan Pembangunan

1 Relatif Rendahnya Daya Saing Sumber Daya manusia (SDM) Masyarakat.

- IPM dibawah Provinsi dan Nasional
- AHH lebih rendah dari Provinsi Jawa Barat
- HLS & RLS dibawah Provinsi dan Nasional
- TPT sebesar 7,65 %



2 Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan dan Masyarakat yang Rentan,

- Angka kemiskinan lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional
- Sebanyak 266.100 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan



3 Ketimpangan Pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi

- Ketimpangan termasuk kedalam klasifikasi Moderat (Rentang 0,3 -> 0,5)



4 Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud

- LPE dibawah Provinsi dan Nasional
- LPE terendah ke 4 di Provinsi Jawa Barat



5 Tata kelola pemerintahan belum optimal menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan publik yang berkualitas dan merata.

- IRB berpredikat B pada tahun 2023
- IPP berpredikat B pada tahun 2023
- Nilai Indeks SPBE 3,07 pada tahun 2023
- Indeks Inovasi Daerah menurun dari tahun 2022



6 Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal

- masih terdapat permasalahan yang dapat memicu Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal



7 Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial

di Kabupaten Cirebon masih terdapat permasalahan yang dapat memicu kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial yaitu Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal.



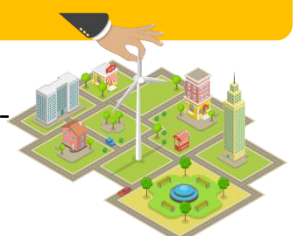
8 Adanya ancaman terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan.

- pemerintah, masyarakat, dan swasta belum sinergis dan nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan budaya asli Cirebon.



9 Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pendukung pengembangan potensi lokal dan mitigasi bencana.

- Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian (KLHS-RPJPD).
- Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku (KLHS-RPJPD).
- Tingginya risiko dan ancaman bencana (KLHS-RPJPD).



10 Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Sarana Prasarana Dasar masyarakat.

- Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman (KLHS-RPJPD) (RT pengguna air bersih 94,89%)
- Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi (KLHS-RPJPD) (RT bersanitasi 89,42%)





NO	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS KABUPATEN CIREBON
1	Relatif Rendahnya Daya Saing SDM Masyarakat	1 Akselerasi peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
2	Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan dan Masyarakat yang Rentan	2 Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan.
3	Ketimpangan Pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi	3 Optimalisasi Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing.
4	Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud	4 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal.
5	Tata kelola pemerintahan belum optimal menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan publik yang berkualitas dan merata	5 Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat terhadap Berbagai Resiko.
6	Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal	6 Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Pondasi Utama Membangun Karakter Masyarakat yang Shalih, Toleran, setara, Harmonis dan Melestarikan Lingkungan Hidup.
7	Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial	7 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Potensi Strategis dan Mitigasi Bencana Daerah.
8	Adanya ancaman terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan.	
9	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pendukung pengembangan potensi lokal dan mitigasi bencana.	
	a. Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian (KLHS-RPJPD).	
	b. Masih rendahnya perencanaan dan pengelolaan sumber air baku (KLHS-RPJPD).	
	c. Tingginya risiko dan ancaman bencana (KLHS-RPJPD).	
10	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Sarana Prasarana Dasar masyarakat.	8 Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat.
	a. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi (KLHS-RPJPD).	
	b. Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman (KLHS-RPJPD).	

Singkronisasi Isu Strategis Internasional, Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON



Isu Global	Isu Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Barat	Isu Strategis Kabupaten Cirebon
Demografi global	Bonus demografi Indonesia	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Akselerasi peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
Urbanisasi dunia			Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan.
Disrupsi teknologi	Konektivitas dan infrastruktur dasar	Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar	Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai Pondasi Utama Membangun Karakter Masyarakat yang Shalih, Toleran, setara, Harmonis dan Melestarikan Lingkungan Hidup.
Perdagangan internasional			Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat.
Perubahan iklim	Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan	Keberlanjutan Penataan Ruang	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Potensi Strategis dan Mitigasi Bencana Daerah.
Geopolitik dan geoekonomi			Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Ekonomi hijau dan ekonomi biru	Green dan blue economy serta pembangunan inklusif	Optimalisasi Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing.
	Desentralisasi dan otonomi daerah	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Strategis Di Kabupaten Cirebon:



Rekomendasi KLHS untuk Visi RPJPD

- Infrastruktur yang tangguh, kota dan pemukiman berkelanjutan, aman dari ancaman bencana.
- Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, air bersih dan sanitasi.
- Pertumbuhan ekonomi, tata kelola dan Kesempatan kerja yang layak.
- Pariwisata, Kelestarian budaya tradisi dan adat istiadat masyarakat.

Visi RPJPD

BERDAYA SAING

MAJU

BERKELANJUTAN

Rekomendasi KLHS untuk Misi RPJPD

Rancangan Misi RPJPD

Mewujudkan Lingkungan yang berkelanjutan didukung infrastruktur yang tangguh, berketahanan terhadap bencana.

Mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera didukung kecukupan sumber air dan sanitasi aman.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja didukung tatakelola pemerintahan yang inovatif, adaptif dan kolaboratif.

Mewujudkan Pariwisata berbasis kelestarian budaya, tradisi dan adat istiadat di Masyarakat.

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berilmu dan Berketrampilan

Meningkatkan Produktivitas dan Kemandirian Ekonomi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, dan Kondusivitas Daerah

Mewujudkan Toleransi Beragama dan Ketahanan Sosial Budaya

Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Inklusif

Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan



BAB IV

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH



Rancangan Visi Kabupaten Cirebon

“ *Kabupaten Cirebon
Berdaya Saing, Maju
dan Berkelanjutan* ”

BERDAYA SAING

Produktivitas Ekonomi, Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Daya Saing

MAJU

Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan

BERKELANJUTAN

Reformasi Birokrasi, Lingkungan Hidup



SASARAN VISI

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045				RPJPD KABUPATEN CIREBON 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5,500	30,300	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 - 57,42	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB Perkapita (Rp Juta)	27,61	54,86-88,10
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7.6	15		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	54.65	495.56		b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	20,39	20,47
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20.8	28		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 - 41,38	46,43 - 47,60				
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 - 5,85	0,09 - 0,34	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	9,20 - 10,16	1,21 - 1,99
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,419 - 0,425	0,357 - 0,380		b. Rasio gini (Indeks)	0,349 - 0,362	0,331 - 0,343
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28.5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12.54	10.77		c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	2,32	2,36
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kerjasama daerah dengan dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (poin)*	3,87	5,00	Kerjasama daerah skala regional dan dengan dunia internasional meningkat	Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	2	10
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0.73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0.56	0.69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,35	78,36
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38.6	93.5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6.61	75.84	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-45.923,63	74.509,35

KESELARASAN ISU STRATEGIS, VISI DAN MISI RPJPD

ISU STRATEGIS KABUPATEN CIREBON		VISI: KABUPATEN CIREBON BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN	MISI RPJPD	
1	Akselerasi peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		1	Mengembangkan sumber daya manusia berilmu dan berketerampilan
2	Integrasi Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskinan.		2	Meningkatkan Produktivitas dan Kemandirian Ekonomi
3	Optimalisasi Sumberdaya Lokal untuk Mendorong Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing.		3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Pelayanan Publik yang Prima dan Handal.		4	Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, dan Kondusivitas Daerah
5	Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat terhadap berbagai resiko		5	Mewujudkan Toleransi Beragama dan Ketahanan Sosial Budaya
6	Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Budaya sebagai sebagai pondasi utama membangun karakter masyarakat yang shalih, toleran, setara, harmonis dan melestarikan lingkungan hidup.		6	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Inklusif
7	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Potensi Strategis dan Mitigasi Bencana Daerah.		7	Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
8	Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Sarana-prasarana Dasar Masyarakat.		8	Mewujudkan Pembangunan yg Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan



Rancangan Misi & Arah Kebijakan

MISI 1

MENGEMBANGKAN SUMBER
DAYA MANUSIA BERILMU DAN
BERKETERAMPILAN

ARAH KEBIJAKAN

MISI 2

MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS
DAN KEMANDIRIAN EKONOMI

ARAH KEBIJAKAN

MISI 3

MEWUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK

ARAH KEBIJAKAN

MISI 4

MEWUJUDKAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN, DAN KONDUSIVITAS
DAERAH

ARAH KEBIJAKAN

TAHAP I

Pondasi

1. Perluasan aksesibilitas
pelayanan pendidikan dan
vokasional adaptif

1. Pembentukan dan penataan
sentra-sentra produksi dan pusat
perekonomian berbasis potensi
dan komoditas unggulan

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan
yang Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif (berakhlak)

1. Peningkatan transformasi
kelembagaan dan tata kelola
ideologi, politik, hukum dan
keamanan daerah

TAHAP II

Akselerasi

2. Peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan dan
vokasional adaptif

2. Peningkatan produktivitas, kualitas
dan daya saing produk barang dan
jasa, serta perluasan sumber
pertumbuhan ekonomi baru

2. Peningkatan fungsi kelembagaan
kolaboratif dan regulasi berbasis
teknologi informasi

2. Penguatan implementasi
kebijakan tegas dan konkrit
untuk mewujudkan kabupaten
yang aman dan tertib

TAHAP III

Pemantapan

3. Penjaminan akses pelayanan
pendidikan dan vokasional
adaptif

3. Penguatan iklim investasi melalui
sinergitas antar sektor investasi
dan industri

3. Penguatan tata kelola
pemerintahan melalui collaborative
governance

3. Penguatan kelembagaan dan
pranata sosial untuk mewujudkan
daerah yang kondusif dan aman

TAHAP IV

Perwujudan

4. Perwujudan masyarakat
Kabupaten Cirebon yang
pintar, berkarakter, unggul
dan sejahtera

4. Perwujudan pembangunan
ekonomi inklusif yang
berkelanjutan

4. Perwujudan tata kelola dan
layanan pemerintahan berbasis
digital yang berintegritas

4. Perwujudan stabilitas keamanan
daerah yang kondusif serta
menjaga stabilitas ekonomi

Rancangan Misi & Arah Kebijakan

MISI 5

MEWUJUDKAN TOLERANSI BERAGAMA DAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA

ARAH KEBIJAKAN

MISI 6

MENINGKATKAN PEMERATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF

ARAH KEBIJAKAN

MISI 7

MENGEMBANGKAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS

ARAH KEBIJAKAN

MISI 8

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

ARAH KEBIJAKAN

TAHAP I
Pondasi

1. Peningkatan toleransi beragama dan kohesi sosial budaya

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur wilayah

1. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar sesuai potensi dan kebutuhan

1. Penguatan tata kelola pembangunan yang berorientasi kepada keberlanjutan dan berwawasan lingkungan

TAHAP II
Akselerasi

2. Penguatan karakter, jati diri, dan toleransi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, maju dan peduli lingkungan

2. Akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah

2. Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas

2. Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan

TAHAP III
Pemantapan

3. Pemantapan karakter dan jati diri bangsa, pengarusutamaan inklusifitas gender, serta penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten

3. Pemantapan infrastruktur wilayah secara inklusif

3. Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar

3. Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan

TAHAP IV
Perwujudan

4. Perwujudan masyarakat madani yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi

4. Perwujudan infrastruktur wilayah secara merata dan inklusif

4. Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas

4. Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



Tema dan Tahap Pembangunan 20 Tahun Kabupaten Cirebon



Sasaran Pokok

PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau untuk semua	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dan Terjangkau untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,17 -76,20	76,46 -77,48	77,74 -78,77	79,03 -80,31
		Kesehatan Ibu dan Anak:				
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	48,00-39,60	37,50-29,10	27,00-18,60	16,50-6,00
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,02-17,07	16,33-13,38	12,65-9,69	8,96-5,27
		Penanganan Tuberkulosis:				
		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	91,00-92,40	92,75-94,15	94,50-95,90	96,25-98,00
		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	91,00-92,40	92,75-94,15	94,50-95,90	96,25-98,00
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,57-98,86	98,93-99,21	99,29-99,57	99,64-100,00
Terwujudnya Pendidikan Merata dan berkualitas Berbasis IPTEK	Pendidikan Merata dan berkualitas Berbasis IPTEK	Hasil pembelajaran:				
		a) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 tahun (tahun)	7,85 - 8,34	8,46- 8,94	9,06- 9,55	9,67-10,28
		b) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,52-12,76	12,82-13,06	13,12-13,35	13,41-13,71
Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat serta Perlindungan Sosial yang adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	10,16 - 8,53	8,12-6,48	6,08-4,44	4,03 - 1,99
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	33,00-43,40	46,00-56,40	59,00-69,40	72,00-85,00

Catatan: Tulisan warna merah adalah SE Pj. Gubernur Jawa Barat No. 73/PR.03.01/BAPP tentang Penyelerasan RPJPD Kab/Kota dengan RPJPD Prov. Jawa Barat Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing	Perekonomian Inklusif dan Berdaya Saing	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,39-20,41	20,41-20,43	20,43-20,45	20,45-20,47
		Pengembangan Pariwisata :				
		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,40-3,35	3,33-3,28	3,27-3,21	3,20-3,13
		b) Jumlah Tamu Wisatawan (Ribu Orang)*	1.179,8 -2.531,27	2.869,13-4.220,60	4.558,47-5.909,93	6.247,80-7.937,13
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,54 - 7,83	7,91 - 8,20	8,27 - 8,56	8,64 - 9,00
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:				
		a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	84,85 - 85,88	86,14 - 87,17	87,42 - 88,45	88,71 - 90,00
		b) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,02-3,79	3,99-4,76	4,96-5,73	5,92-6,89
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,70-6,47	6,42-6,19	6,13-5,90	5,79-5,56
		Indeks Inovasi Daerah	62,00 - 64,27	68,84 - 67,12	67,69 - 69,96	70,53 - 73,37
Meningkatnya Penerapan ekonomi hijau, biru, dan oranye	Penerapan ekonomi hijau, biru, dan oranye	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:				
		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,30 - 66,05	67,24 - 71,99	73,18 - 77,93	79,11 - 85,05
		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,40 - 32,30	34,53 - 43,43	45,66 - 54,56	56,78 - 67,91
Terwujudnya Pembangunan SDM berdaya saing dan transformasi digital	Pembangunan SDM berdaya saing dan transformasi digital	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,40 - 6,72	6,80 - 7,12	7,20 - 7,52	7,60 - 8,00
Meningkatnya Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,08-28,10	28,11-28,13	28,14-28,16	28,17-28,20
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	(-19,86) - (-12,70)	(-10,91) - (-3,75)	(-1,96) -5,20	6,99 -15,94

Sasaran Pokok

PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Meningkatnya Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:				
		a) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkerlanjutan	81,41-85,13	86,06-89,78	90,71-94,42	95,35-100,00
		b) Persentase Desa Mandiri (%)	13,83-18,59	19,78-24,54	25,73-30,48	31,67-37,62
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Hukum*	90,70-92,56	93,03-94,89	95,35-97,21	97,68-100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,07 - 3,23	3,27 - 3,42	3,46 - 3,62	3,66 - 3,85
		Indeks Pelayanan Publik	3,82 - 3,96	3,99 - 4,13	4,17 - 4,30	4,34 - 4,51
Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Daerah	Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	60,00 - 65,00	66,25 - 71,25	72,50 - 77,50	78,75 - 85,00
		Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,53 - 1,42	1,65 - 2,54	2,77 - 3,66	3,88 - 5,00
		Tingkat Inflasi (%)	2.92 - 3.02	2,50 - 1,5	2,00 - 1,00	1.93 - 2.91
Meningkatnya kerjasama regional maupun internasional	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional	Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10
Terwujudnya kerukunan umat beragama	Peningkatan kerukunan umat beragama	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,10 - 56,56	57,18 - 59,64	60,26 - 62,72	63,33 - 66,41
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,39 - 74,38	74,87 - 76,86	77,36 - 79,34	79,84 - 82,32

Catatan: Tulisan warna merah adalah SE Pj. Gubernur Jawa Barat No. 73/PR.03.01/BAPP tentang Penyelerasan RPJPD Kab/Kota dengan RPJPD Prov. Jawa Barat Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok

PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON



Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target			
			2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,40-0,36	0,35-0,31	0,31-0,27	0,26-0,21
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup				
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,08-64,09	64,34-65,35	65,60-66,61	66,86-68,12
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	15,59-29,96	33,56-47,93	51,52-65,89	69,49-87,45
		c) Pengelolaan Sampah				
		i. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	3,33-19,78	23,90-40,35	44,46-60,91	65,03-85,59
		ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	74,06-79,25	80,55-85,73	87,03-92,22	93,52-100,00
Meningkatnya ketahanan pangan, air dan energi	Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				
		a) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	6,69-5,62	5,36-4,29	4,03-2,96	2,69-1,36
		b) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	30,62-44,50	47,97-61,84	65,31-79,19	82,66-100,00
Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	140,56 -133,88	132,22 - 125,54	123,87 - 117,19	115,53 - 107,18
		Penurunan Emisi GRK (%):				
		a. Kumulatif	(-106.542,83) - (-240.987,44)	(-274.598,60) - (-409.043,21)	(-442.654,36) - (-577.099,97)	(-610.710,13) - (-778.765,89)

Catatan: Tulisan warna merah adalah SE Pj. Gubernur Jawa Barat No. 73/PR.03.01/BAPP tentang Penyelerasan RPJPD Kab/Kota dengan RPJPD Prov. Jawa Barat Tahun 2025-2045



TERIMA KASIH

RAME ING GAWE, SUCI ING PAMRIH

 **Jl. Sunan Kalijaga No. 11 Sumber, Kabupaten Cirebon Kode Pos 45611**

 **(0231) 321991**

 **bappelitbangda.kabcirebon**

 **bappelitbangda.cirebon**

 **<http://bappelitbangda.cirebonkab.go.id>**

 **Rumah Aspirasi: <http://bit.ly/maharmaskaton>**

 **Bappelitbangda Kab Cirebon**



Link materi :

